

# EKONOMI RESTORATIF SEBAGAI KRITIK TERHADAP EKSTRATIVISME

Cocon

Development Planner  
Center for Study and Empowerment of FMR

Pemerintah baru saja merilis data perkembangan kinerja ekonomi selama triwulan pertama tahun 2026, BPS mencatat kinerja pertumbuhan ekonomi (PDB Indonesia) yang sangat positif yakni mencapai 5,61% (y-on-y)<sup>1</sup>. Ironisnya, data pertumbuhan PDB justru memunculkan polemik dimata para pengamat ekonomi. Basis pertimbangan yang mereka pakai adalah karena angka tersebut tidak sejalan dengan realitas yang terjadi dalam dinamika perekonomian nasional saat ini, apalagi ditambah faktor geopolitik global yang kian tidak menentu. Para pengamat beralasan hampir semua indikator PDB justru kinerjanya menurun seperti investasi, devisa ekspor, depresiasi nilai rupiah terhadap dollar, de-industrialisasi yang ditunjukkan dengan banyaknya PHK massal, dan *purchasing power* masyarakat yang kian tertekan. Pakar Ekonomi, Prof. Ferry Latuhihin mengeluarkan pernyataan menohok bahwa angka pertumbuhan PDB jikapun betul naik sebesar 5,61%, itu lebih karena upaya kuratif dengan menginfus belanja pemerintah melalui program MBG dan KDMP dan itu bersifat sementara.

Menarik apa yang disampaikan Direktur Celios, Bima Yudhistira dalam kesempatan wawancara pada sebuah podcast. Menurutnya, salah satu hal penting yang perlu dilakukan Indonesia untuk saat ini adalah mendorong Ekonomi Restoratif. Penulis mengamini apa yang disampaikan Direktur Celios tersebut, tentu dengan melihat dan mengamati dinamika perekonomian nasional saat ini. Secara awan publik bisa menilai, apakah penghitungan PDB saat ini masih relevan untuk menterjemahkan kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan?

PDB semestinya bukan hanya sebatas angka kuantitatif yang bersifat makro. Pertumbuhan berkualitas (*quality of growth*) adalah manakala pertumbuhan ekonomi secara linier diikuti oleh perbaikan seluruh indikator kesejahteraan masyarakat. Melihat realitas saat ini, jelas terlihat kue pertumbuhan ekonomi masih belum terdesentralisasi secara berkeadilan. Ada aglomerasi ekonomi yang hanya terkooptasi pada para pemilik modal besar. PDB yang sentralistik menunjukkan bahwa sebenarnya angka angka tersebut bersifat semu. Artinya nampak bagus dipermukaan namun tidak memberikan daya ungkit bagi distribusi keadilan ke semua kalangan. Thomas Piketty, dalam bukunya *Capital in the Twenty-First Century* (2013)<sup>2</sup> menyoroti adanya jurang

---

<sup>1</sup>[https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2575/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2026-tumbuh-5-61-persen--y-on-y-.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2575/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2026-tumbuh-5-61-persen--y-on-y-.html?utm_source=chatgpt.com)

<sup>2</sup>Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press. Buku ini menjelaskan bahwa alam kapitalisme modern, kekayaan cenderung semakin terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal, sehingga ketimpangan ekonomi terus meningkat.

ketimpangan kue ekonomi antara pemilik modal besar dengan masyarakat, dimana pemilik modal besar lebih cepat mengakumulasi aset dan kekayaan. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana laporan Oxfam Indonesia dan INFID tahun 2017<sup>3</sup> mengkonfirmasikan bahwa kekayaan 4 orang super kaya Indonesia lebih besar dari kekayaan 100 juta orang miskin Indonesia.

Jika demikian, semestinya basis penghitungan PDB yang masih *GDP-oriented* sudah harus ditransformasi sehingga dapat lebih jelas menggambarkan kualitas perekonomian suatu negara yang realistis. Lalu muncul pertanyaan, *what kind of growth?*

### **Paradoks Eco-Nomic**

Konsep *equity of growth* menjadi bahasan menarik, jika melihat kondisi dan tantangan global ke depan. *Equity of growth* adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap perbaikan kinerja pada atribut-atribut sosial-kultural dan ekologi. Kesimpulannya, ada pemerataan berkeadilan terhadap kue pembangunan. Meskipun gaung tentang *sustainable development* masih terus gencar dilakukan diberbagai negara di dunia, terutama negara-negara maju melalui forum-forum global, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan telah menuangkannya dalam berbagai dokumen teknokratik. Namun, faktanya politik ekonomi yang diterapkan tidak demikian. Politik ekonomi modern seolah kembali mendorong pada pendekatan ekonomi konvensional yakni *brown growth*.

Fakta ini jelas terlihat dari berbagai negara, terutama yang masih konsisten dengan *GDP-oriented*. Basis penghitungan PDB yang menitikberatkan pada investasi, kinerja ekspor-impor, belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga, menurut pandangan penulis justru menggiring pada pendekatan ekonomi eksploitatif dan konsumtif. Setiap digit pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak eksternalitas terhadap aspek sosial dan ekologis. *GDP-oriented* selalu menitikberatkan pada upaya ekstraktivisme dan cenderung non-inklusif dan justru menghasilkan jurang ketimpangan antara pemilik modal dengan masyarakat kelas bawah. Upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan *effort* dalam bentuk eksplorasi sumber daya alam, energi, material, lahan dan lainnya dan justru memberikan tekanan kuat terhadap ekologi. Adanya tekanan kuat terhadap atribut faktor ekologi akan memberikan efek eksternalitas terhadap aspek sosial terutama masyarakat terdampak.

Contoh konkrit paradoks eco-nomic, yakni Kabupaten Halmahera Tengah sebagai pusat industri nikel. Tahun 2025, BPS Halmahera Tengah mencatat pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Utara mencatat rekor tertinggi nasional yakni sebesar 62% (y-on-y). Tingginya angka pertumbuhan ini didorong oleh investasi hilirisasi nikel, pertambangan dan industri pengolahan nikel yang memberikan *share* lebih dari 62,64% terhadap PDRB. Lalu, menyambung pada pertanyaan *what kind of growth?* Ini jelas nampak terlihat bahwa angka PDRB yang ada justru tidak menggambarkan realitas

---

<sup>3</sup> Oxfam & INFID. (2017). Towards a More Equal Indonesia: How the Government Can Take Action to Close the Gap Between the Richest and the Rest. Oxford: Oxfam International.

peningkatan indikator social dan ekologi. BPS Halmahera Tengan mencatat, tahun 2025 angka kemiskinan di Halmahera Tengah mencapai 9,16% turun dari 10,11% di tahun 2024<sup>4</sup>. Angka ini justru jauh di bawah rata rata tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara. Disisi lain, keberadaan pertambangan dan industri nikel justru memberikan tekanan kuat terhadap penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem sumber daya yang menjadi ladang penghidupan masyarakat. Kejadian pencemaran lingkungan perairan akibat limbah tambang, terutama Halmahera Tengah dan kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menjadi isu yang sangat sentral padahal Halmahera merupakan basis sumber daya perikanan (sumber : berita mongabay.co.id)<sup>5</sup>. Ini adalah contoh sebagian kecil terjadinya *trade off* dalam pengelolaan sumber daya. Belum lagi jika bicara Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah), Papua dan lainnya. Jika merunut pada berbagai realita di atas, sepantasnya kita harus melakukan koreksi terhadap tata kelola sumber daya alam, termasuk menggeser pola pendekatan dari *GDP-oriented* ke *green growth* yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah memungkinkan ?

### **Kritik Terhadap *GDP-Oriented Approach***

*GDP-oriented* hanya memfokuskan pada proses produksi untuk menghasilkan output nilai tanpa mempertimbangkan siapa yang dapat merasakan hasilnya. Akumulasi nilai manfaat ekonomi justru hanya dirasakan sentralistik. Padahal konstitusi pasal 33 UUD 1945 jelas secara eksplisit menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat dalam hal ini adalah pemberi mandat, termasuk jaminan kualitas sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Oleh karenanya, tidak heran kalau ketimpangan ekonomi terus terjadi.

Aktivitas ekstraktif (ekstrativisme) untuk menggenjot PDB secara nyata telah menyisakan berbagai problem antara lain : krisis ekologis, alih fungsi lahan, deforestasi, penurunan biodiversity, dan konflik sosial, terutama agraria. Dampak ekologis tersebut secara langsung telah menghilangkan nilai ekonomi sumber daya khususnya jasa ekosistem sebagai indikator nilai ekonomi langsung (*direct use value*) maupun tidak langsung (*indirect use value*). Nilai ekonomi inilah yang saat ini lepas dan dianggap sebagai indikator eksternal yang justru ditanggung oleh masyarakat bukan oleh pemilik modal sendiri. Padahal seyogyanya dalam prinsip *sustainable development* valuasi nilai ekonomi dampak harus diinternalisasi dalam penghitungan PDB. Kesimpulannya basis penghitungan melalui pendekatan *GDP-oriented* sebenarnya tidak mencerminkan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development principles*).

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah. 2025. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Halmahera Tengah 2025.

<sup>5</sup> Nasib Masyarakat Pesisir Weda Ketika Ada Hilirisasi Nikel” Mongabay Indonesia, 18 Juli 2025. kejadian pencemaran lingkungan perairan akibat aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel, terutama di Kabupaten Halmahera Tengah dan kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), menjadi isu lingkungan yang semakin sentral. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran karena Halmahera merupakan salah satu wilayah penting sumber daya perikanan dan ekosistem pesisir di Maluku Utara. Laporan investigatif media lingkungan seperti Mongabay menyoroti perubahan kualitas perairan, sedimentasi, tekanan terhadap ekosistem pesisir, serta dampaknya terhadap masyarakat nelayan lokal.

Sayangnya, ide terkait *green GDP* yang mencuat di forum global masih belum terimplementasikan, alasan klasiknya yakni dalam tataran teknis belum adanya standar atau model yang disepakati untuk mem-*valuasi environmental dan social cost* sebagai indikatornya karena bersifat multidimensi. Terlepas dari itu, penulis memandang, sebenarnya bukan pada tataran teknis, tapi politik ekonomi modern di sebagian besar negara-negara di dunia masih mengadopsi paham *developmentalism*. Artinya, konvensi internasional mengenai *sustainable development* hanyalah pada tataran dokumen, belum ada aksi nyata. Jika merujuk pada data empiris yang ada, bahwa sejak deklarasi Stockholm tahun 1972, nyaris sebenarnya pendekatan pertumbuhan masih dilakukan secara konvensional (*brown growth*) yakni melalui ekstraktivisme, sementara implementasi prinsip dasar *sustainable development* masih jauh panggang dari api.

Terlepas dari memungkinkan atau tidak, gagasan mengenai ekonomi restoratif (*restorative economy*) menjadi bahasan menarik dan patut dijadikan alternatif kebijakan ke depan. Mengingat tantangan global kedepan yang semakin berat, khususnya terkait dengan isu-isu lingkungan, pangan, energi, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi restoratif merupakan pendekatan ekonomi yang menyeimbangkan upaya pemanfaatan nilai ekonomi sumber daya dengan upaya pemulihan (restorasi) yang bernilai tambah. Pendekatan ekonomi ini fokus pada bagaimana agar akumulasi nilai kekayaan sumber daya terdistribusi secara berkeadilan, regenerasi kualitas lingkungan, dan penguatan komunitas/masyarakat lokal sebagai subjek dari pembangunan. Intinya ekonomi restoratif adalah jalan tengah untuk meng-*caunter* atau kritik terhadap ekstraktivisme yang dinilai tidak terukur dan mengabaikan prinsip *sustainability* yang justru menyisakan masalah jangka panjang terutama berkaitan dengan keadilan antar generasi (*intergenerational justice*).

### ***Restorative Green GDP (RGGDP) Sebagai Instrumen Ekonomi Restoratif***

Gagasan transformasi *GDP-oriented* yang cenderung ekstraktif menjadi *restorative green GDP* (RGGDP) sebenarnya pernah mencuat dan pernah diterapkan di beberapa negara. Perbedaan mencolok penghitungan GDP Konvensional (*GDP-oriented*) yang saat ini diadopsi banyak negara termasuk Indonesia dengan RGGDP adalah adanya internalisasi indikator baru yakni nilai biaya kerusakan ekologis (*environmental damage*), deplesi sumber daya (*resources depletion*), biaya pemulihan (*environmental restoration value*), kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi (*social well-being value*).

Sebagai *best practice*, China pernah melakukan implementasi *green GDP accounting* yang diinisiasi oleh *State Environmental Protection Administration* (SEPA), dan *National Bureau of Statistics China* sekitar tahun 2004 – 2006<sup>6</sup>. China melakukan internalisasi

---

<sup>6</sup> "Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages" World Bank & SEPA, 2007. *Green GDP Accounting* yang diinisiasi oleh *State Environmental Protection Administration* (SEPA) bersama *National Bureau of Statistics of China* sekitar tahun 2004–2006. Kebijakan ini bertujuan mengoreksi perhitungan GDP konvensional dengan memasukkan biaya kerusakan lingkungan dan deplesi sumber daya alam ke dalam sistem akuntansi ekonomi nasional. Program tersebut muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya ekologis akibat industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat pada awal 2000-an.

biaya *environmental losses* dalam penghitungan GDP, sehingga GDP tidak hanya mencerminkan akumulasi output produksi, namun telah mempertimbangkan nilai ekonomi yang hilang akibat dari dampak kegiatan pemanfaatan sumber daya di berbagai sektor. Hasilnya mengejutkan, bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi dibayar oleh kerusakan ekologis, yakni biaya kerusakan ekologis mencapai 10% dari GDP. Sayangnya, tahun 2007 mulai ada resistensi politik dan implementasi *green GDP* mulai melemah, karena nilai GDP konvensional menurun cukup signifikan. Tapi, penerapan model *green GDP* memberikan pelajaran berharga bagi China yang berimplikasi pada perubahan orientasi kebijakan pembangunan saat ini. China mulai sadar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari biaya ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Dampaknya, saat ini transformasi regulasi dan kebijakan China lebih fokus pada *green transformation* dan *ecological governance*. Ini tentunya patut menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Kebijakan ekonomi restoratif harus sudah mulai difikirkan dan menjadi fokus pendekatan pembangunan ekonomi ke depan, ini karena Indonesia adalah negara dengan basis sumber daya alam. Meskipun, penerapan RGGDP dipastikan akan mendapatkan resistensi politik, tapi setidaknya Indonesia perlu menyusun model atau standar penghitungan RGGDP pada setiap sector dan daerah terutama yang saat ini mengandalkan pada aktivitas ekstraktif seperti pertambangan. Intinya harus ada *restorative green GDP framework*. Ini penting sebagai basis data dan acuan melakukan transformasi pendekatan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah harus mulai berani melakukan terobosan yang lebih adaptif untuk menjamin adanya *equity of growth* seperti yang diuraikan diatas. Harus ada langkah maju dan progresif dalam menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang berbasis ekonomi restoratif. Ada setidaknya 2 (dua) kebijakan yang perlu menjadi pertimbangan serius untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang lebih holistik.

**Pertama**, kebijakan fiskal, antara lain : (1) insentif bagi daerah yang berbasis pada *conservation value/restoration value*; (2) penerapan instrument ekonomi lingkungan secara konsisten berbasis *polluter pays principle*; (3) subsidi hijau (*green subsidy*) bagi sector pertanian regeneratif dan sektor yang berbasis pada *blue economy* dan *circular economy*, (4) pembiayaan hijau (*green bond/green fund*) untuk kegiatan ekonomi yang menerapkan teknologi bersih dan rendah karbon; (5) pajak karbon (*carbon tax*); (6) insentif untuk investasi transformasi dari energi fosil menjadi energi berkelanjutan (*sustainable energy*), maksudnya bukan hanya sebatas energy terbarukan (*renewable energy*); dan (7) penerapan pajak eksploitasi sumber daya (*resources rent tax*) bagi kegiatan ekonomi yang mendapatkan keuntungan besar dari eksploitasi SDA seperti pertambangan nikel. Pajak tersebut kemudian direstitusi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal, dan upaya restorasi dan konservasi.

**Kedua**, kebijakan penataan ruang. Berbagai konflik pemanfaatan ruang, mengindikasikan adanya ketimpangan orientasi kepentingan antara aspek ekonomi (akumulasi atas output produksi) dengan aspek ekologi dan sosial. Artinya kebijakan penataan ruang di Indonesia menurut penulis masih *GDP-oriented Development*. Ini

Nampak terlihat adanya kecenderungan kebijakan ini lebih dominan bagaimana membuka karpet merah bagi investasi ekstraktif. Sementara pendekatan *ecological-oriented* dan *social-well-being* terkesan masih dikesampingkan. Kita harus belajar dari China yang mengeluarkan kebijakan *Ecological Red Line Policy* yakni kebijakan yang melarang eksploitasi di kawasan tertentu meskipun memiliki potensi nilai ekonomi besar<sup>7</sup>. China menjadikan aspek ekologi sebagai batas pembangunan. Dalam konteks Indonesia, penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) semestinya mempertimbangkan ekonomi restoratif untuk menghindari terjadinya *zero sum game* yang justru mengancam keberlanjutan.

Sebenarnya regulasi di Indonesia sudah cukup banyak mengatur terkait ini. Contoh saja Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur internalisasi biaya lingkungan ke dalam struktur biaya produksi perusahaan, namun demikian masih lemah dalam tataran implementasi dan penegakan aturan. Internalisasi biaya lingkungan, pada faktanya juga masih dibebankan pada masyarakat dengan memasukannya kedalam struktur harga produk. Maka tidak heran jika *green product* justru lebih mahal. Ini mestinya jadi evaluasi Pemerintah. Oleh karenanya, *restoratif green GDP framework* harus segera disusun, setidaknya sebagai acuan kebijakan perekonomian nasional yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Memang tantangannya tidak mudah, justru bukan pada tataran teknis, tapi pada *political will*. Sayangnya sampai saat ini politik ekonomi kita masih didominasi oleh kepentingan ekonomi, ini disebabkan karena secara institusional masih ada pengaruh cukup besar dari pemilik modal yang orientasinya pada akumulasi output produksi. Maka tidak heran implementasi RGGDP dalam waktu dekat tidak akan bisa terealisasi akibat resistensi politik, kecuali ada Pemimpin yang membawa misi progresif.

*\*Artikel adalah opini penulis berdasarkan rujukan dari berbagai sumber*

---

<sup>7</sup> China mengembangkan kebijakan Ecological Red Line Policy (Shengtai Baohu Hongxian) sebagai bagian dari strategi Ecological Civilization. Kebijakan ini bertujuan menetapkan batas ekologis yang harus dilindungi dan tidak boleh dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi maupun ekspansi pembangunan.